

## **ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM ERA DESENTRALISASI FISKAL**

*(ANALYSIS OF FINANCIAL INDEPENDENCE IN THE REGENCY ERA JEMBER FISCAL  
DECENTRALIZATION)*

**Regina Niken Wilantari**

Staf Pengajar Program Studi IESP Fakultas Ekonomi Universitas Jember  
Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337990/HP.08123456290

### ***Absract***

*One aspect that is important in the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization is a regional financial independence. Local governments should have the financial resources sufficient to finance regional development. The ability of a local government in carrying out its duties and functions specified by the local government's financial condition. This study aims to analyze the financial independence of Jember districts in a decentralized fiscal (2008 to 2011). In measuring the area of financial independence using Independence Financial Ratios, Ratio effectiveness and Degree of Fiscal Decentralization. The results of this study are 1) Jember have a relationship with the central government pattern that is instructive, so the dominant role of the central government over local government. 2) The ability of local governments to undertake the realization of revenue targets have been planned well enough 3) Jember have a fairly high level of dependency on government transfers*

***Keywords :*** *Fiscal Decentralization, financial independence*

### **1. Pendahuluan**

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berawal dari krisis moneter dengan peningkatan inflasi yang cukup tinggi, jatuhnya nilai tukar rupiah serta terpuruknya sektor riil dan pada akhirnya berujung pada krisis yang bersifat multidimensi. Krisis tersebut memunculkan gerakan reformasi, salah satu agenda reformasi 1998 adalah otonomi daerah yang pada dasarnya ingin menata kembali hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Kaho,2012).

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dijelaskan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui otonomi daerah, pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam TAP MPR tersebut menunjukkan bahwa peran aktif dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pembanguan ekonomi nasional. Dengan adanya otonomi daerah maka kapasitas dan potensi daerah dapat dioptimalkan, selain itu hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat lebih merata.